

Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh Aparatur Pemerintah Daerah

Muktiono

**Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**



Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama.

Besok, di mana pun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda.

- Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar.
- Berikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas.
- Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas.
- Temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri.
- Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan.

Apa pun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak.

Selamat Hari Guru,

#merdekabelajar #gurupenggerak

*Wassalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Santi Santi Santi Om,
Nama Buddhaya,
Rahayu.*

Jakarta, 25 November 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim

Surat Menteri di Hari Guru

Pemerintah
(Policy Maker)

Publik

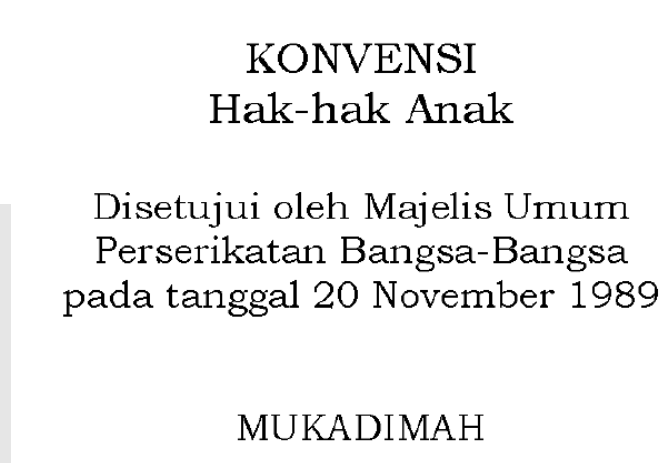


Service Provider

Martabat Manusia
(delivered)

Mengapa harus berbasis HAM?

- Pak Menteri mempunyai kewajiban 5M (memajukan, memenuhi, menghormati, melindungi, dan menegakkan) 10 hak-hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan:
 1. Kesempatan bermain;
 2. Pendidikan;
 3. Perlindungan;
 4. Identitas hukum;
 5. Status kebangsaan;
 6. Makanan;
 7. Kesehatan;
 8. Rekreasi;
 9. Kesetaraan;
 10. Peranan dalam pembangunan.



Fungsi dan Tujuan Normatif Pendidikan Secara Umum

Pendidikan nasional berfungsi:

1. Membangun watak dan peradaban yang bermartabat
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa

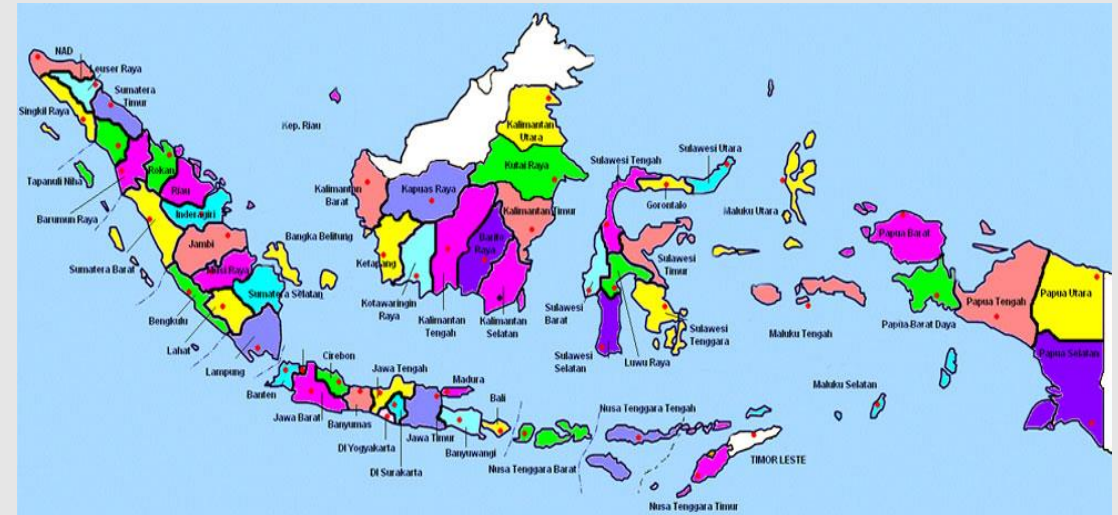
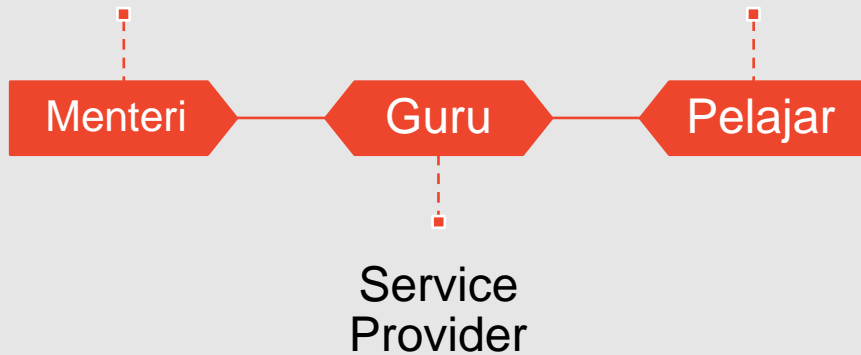
Tujuan:

1. Peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
2. Peserta didik yang berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan mandiri
3. Warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab

(UU Sisdiknas)

Heterogenitas Daerah Implementasi

Pemerintah
(Policy Maker)



- Disparitas sosial dan ekonomi
- Keragaman kultur lokal
- Kapasitas service provider

Multiperan Guru

Organizer

Motivator

Transmitter

Mediator

Communicator

Facilitator

Director

Informator

Evaluator

Kompleksitas Stakeholders



Manfaat HRBA-PS

- Pemerintah

- a. Penyelesaian masalah yang bermartabat
- b. Identifikasi pemegang kewajiban dan pemegang hak beserta kesenjangan kapasitas
- c. Membawa perubahan organisasi dan perilaku aparatur pemerintah
- d. Membawa pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya
- e. Fokus pada problem disparitas

- Masyarakat

- a. Memberdayakan masyarakat untuk mengenali hak dan cara klaim yang benar
- b. Prioritas pada kelompok rentan, minus, atau pinggiran
- c. Memajukan partisipasi dan *sharing* informasi
- d. Peningkatan akuntabilitas terhadap hasil dan proses

Prinsip Dasar HRBA-PS

1. Partisipasi
2. Akuntabilitas
3. Nondiskriminasi dan Ekualitas
4. *Empowerment* (Pemberdayaan)
5. Legalitas
6. Inklusif
7. Subsidiaritas (dibangun dan dimiliki secara lokal)
8. Sinergi (*top-down – bottom-up*)
9. Rekognisi
10. Keadilan sosial
11. Ekuitas (mengurangi disparitas)

Terima Kasih

Catatan:

1. HRBA-PS menempatkan nilai-nilai HAM sebagai landasan atau fundamen dalam proses pelayanan publik.
2. Nilai-nilai HAM memang bersifat universal, tetapi implementasinya dalam HRBA-PS sangat menimbang kondisi lokal.
3. Prinsip-prinsip HRBA-PS menegaskan posisi aparatur pemerintah sebagai *duty-bearer*, namun tetap meneguhkan inklusi dan partisipasi semua *stakeholders*, serta prinsip subsidiaritas (oleh dan untuk lokal).
4. HRBA-PS mengedepankan pemberdayaan masyarakat secara sistemik/struktural, dan bukan menempatkan mereka sebagai objek pasif program pembangunan.